

Kajian INDEF

**KINERJA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA TIGA
PEMERINTAHAN**

Oleh

Dradjad H. Wibowo (Ekonom Senior INDEF, Wanhor PAN)

Andry Satrio Nugroho (Peneliti INDEF)

Nailul Huda (Peneliti INDEF)

Izzudin Al Farras Adha (Peneliti INDEF)

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Jakarta, 20 Februari 2018

Ditengah hiruk pikuk tahun politik, masyarakat perlu mengevaluasi berjalannya pemerintahan Jokowi-JK selama 3 tahun terakhir. Berbagai survei 3 tahun Jokowi-JK menjelaskan bahwasektor ekonomi merupakansektor dengan tingkat kepuasan masyarakat paling rendah dibandingkan dengan bidang lainnya. Salah satu hal yang sangat penting untuk dievaluasi adalah kemampuan pemerintahan ini dalam menyerap tenaga kerja. Riset singkat ini akan mengulas pencapaian kinerja tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan perbandingannya terhadap tiga tahun pertama dalam periode pemerintahan sebelumnya yaitu SBY-JK dan SBY-Boediono.

Indikator penciptaan tenaga kerja berisikan beberapa aspek seperti rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dan rasio penciptaan kerja (RPK)¹. Rata-rata tambahan jumlah penduduk didapatkan dari jumlah penduduk bekerja di tahun sesudah dikurangi penduduk bekerja di tahun sebelum. Jika data yang digunakan menggunakan dua periode pengambilan (Februari dan Agustus), maka perlu diambil selisih dari tiap periode dan melakukan rata-rata keduanya. Sementara, rasio penciptaan kerja (RPK) merupakan perbandingan antara rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dengan pertumbuhan ekonomi sehingga didapatkan tambahan penduduk yang bekerja tiap pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2015 dan 2016, rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja belum sampai 2 juta dan rasio penciptaan kerja yang tidak sampai 500 juta. Namun, tahun 2017 justru melejit ke angka 3,25 juta. Hal ini diindikasikan oleh beberapa faktor yang memungkinkan. Secara umum, sektor jasa menjadi penyerap terbesar dengan dua sektor kontributor terbesar yaitu sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (33.56%), disusul dengan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi(32.20%).

Data jumlah penduduk bekerja yang dirilis oleh BPS melingkupi pengangguran terselubung yaitu penduduk yang bekerja tidak sampai dengan 35 jam per minggu. Hal ini menyebabkan angka penduduk bekerja secara total tidak menggambarkan penduduk bekerja yang optimal. Indikasi meningkatnya sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan disumbang terbesar oleh kegiatan padat karya melalui program dana desa sedangkan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi ditopang oleh *boome-commerce* dan meningkatnya sektor pariwisata.

Tabel 1. Indikator Penciptaan Tenaga Kerja Periode 2004-2017

Tahun	Rata-rata Tambahan Jumlah Penduduk Bekerja (juta)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Rasio Penciptaan Kerja *)
2004	0,91	5,03	181.130
2005	0,73	5,69	128.509
2006	0,87	5,50	157.690
2007	3,44	6,35	542.103
2008	3,54	6,01	589.424
2009	2,38	4,63	513.462

¹Indef pada pertengahan dekade 2000-an memperkenalkan variabel ini sebagai “Elastisitas Penciptaan Kerja”, yang kemudian diubah menjadi Rasio Penciptaan Kerja (RPK) karena lebih tepat secara ekonomi.

2010	3,13	6,22	502.681
2011	1,92	6,17	311.911
2012	3,55	6,03	589.104
2013	1,06	5,56	191.086
2014	2,05	5,01	410.179
2015	1,43	4,88	294.085
2016	1,70	5,02	338.312
2017	3,25	5,07	641.183

Sumber: Dradjad H. Wibowo (2018)

Keterangan: *) Tambahan penduduk bekerja/1% pertumbuhan ekonomi

Penciptaan kerja merupakan peubah ekonomi-politik yang sangat krusial. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, misalnya, penciptaan kerja yang menjadi program yang paling efektif. Bukan program “tebar uang” seperti bantuan langsung, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP).Maka dari itu, setiap pemerintahan, salah satu ukuran keberhasilannya adalah penciptaan kerja yang mana dengan adanya tambahan pekerjaan, kesejahteraan akan ikut terangkat.

Rata-rata tambahan penduduk bekerja pada masa 3 tahun awal pemerintahan pemerintahan Jokowi-JK ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY-Boediono. Rata-rata tambahan penduduk bekerja di masa pemerintahan Jokowi-JK adalah 2,13 juta penduduk per tahun. Sedangkan di masa pemerintahan SBY-Boediono mencapai 2,87 juta penduduk.

Rasio penciptaan kerja pada pemerintahan Jokowi-JK juga lebih rendah daripada masa pemerintahan SBY-Boediono, namun lebih tinggi daripada masa 3 tahun awal pemerintahan SBY-JK. Pada 3 tahun awal pemerintahan Jokowi-JK, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menambah jumlah penduduk bekerja sebesar 426,297penduduk.

Pada masa pemerintahan SBY-Boediono, satu persen pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan penduduk yang bekerja sebesar 467 ribu penduduk. Sedangkan pada masa pemerintahan SBY-JK, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya meningkatkan jumlah penduduk bekerja sebesar 287,062penduduk. Hal ini disebabkan pada tahun 2005 terjadi kenaikan harga BBM subsidi yang cukup tinggi yang berimplikasi pada perekonomian.

Jika tahun 2005 dikeluarkan dari perhitungan, pada masa pemerintahan SBY-JK (2006-2009), satu persen pertumbuhan meningkatkan penduduk bekerja sebanyak 450 ribu penduduk. Jadi pada masa pemerintahan Jokowi-JK, penciptaan kerja mengalami kinerja paling buruk.

Tabel 2. Perbandingan indikator penciptaan kerja dalam tiga tahun pertama pemerintahan

Indikator	Jokowi - JK (2015- 2017)	SBY - Boediono (2010- 2012)	SBY - JK (2005- 2007)
Tambahan penduduk bekerja (penduduk/tahun)	2.127.221	2.868.457	1.678.214

Tabel 3. Rata-Rata Tambahan Penduduk Bekerja Dalam 3 Tahun Pertama Pemerintahan (penduduk/tahun)

Sektor Ekonomi	Jokowi - JK (2015-2017)	SBY - Boediono (2010-2012)	SBY - JK (2005-2007)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	(700.624)	(564.284)	433.199
Pertambangan dan Penggalian	(49.520)	153.924	(9.002)
Industri	489.521	758.816	386.967
Listrik, Gas, dan Air Minum	35.157	20.080	(6.633)
Konstruksi	134.592	483.633	94.918
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1.106.590	674.257	290.268
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	169.137	(296.453)	95.543
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	186.754	422.459	66.929
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	755.615	1.216.026	326.025

Sumber: Indef (2018), diolah dari data BPS

Tabel perbandingan tambahan penduduk bekerja dalam tiga tahun pertama pemerintahan (Tabel 3) menunjukkan fakta yang menarik. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan justru menurun sangat drastis, yakni lebih dari 700 ribu tenaga kerja, bahkan bila dibandingkan dengan 3 tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono. Selain itu, penurunan juga terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar hampir 50 ribu tenaga kerja. Tak kalah menarik, sektor Konstruksi hanya memberi tambahan hampir 135 ribu tenaga kerja selama 3 tahun Jokowi-JK ditengah masifnya pembangunan infrastruktur, jauh dibandingkan era SBY-Boediono. Terakhir, sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi berhasil membalikkan angka negatif pada era SBY-Boediono menjadi hampir 170 ribu tambahan tenaga kerja selama 3 tahun era Jokowi-JK. Selain itu, sektor *real estate* yang melemah pada periode ini, turut menyumbangkan penyerapan tenaga kerja rendah yang dapat dilihat dari melambatnya penyerapan tenaga kerja selama tiga tahun terakhir.

Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan pada 3 tahun awal pemerintahan Jokowi-JK mengalami tekanan sehingga menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang dihasilkan dari satu persen pertumbuhan ekonomi menjadi minus. Artinya, pertumbuhan output sektor ini ternyata tidak mampu meningkatkan penduduk bekerja. Bahkan keadaan ini lebih buruk daripada 3 tahun awal periode kepemimpinan SBY-Boediono. Selama periode 3 tahun awal Jokowi-JK, pekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, rata-rata mengalami penurunan sebesar 700 ribu penduduk per tahun. Pada awal SBY-Boediono, walaupun berkurang juga namun tidak sebesar pada awal pemerintahan Jokowi-JK. Penyebab utamanya adalah masih rendahnya harga komoditas perkebunan unggulan seperti kakao dan kopi. Selain itu, Nilai Tukar Petani pada tahun 2017 menyentuh level terendahnya (dibawah 100). Masyarakat tidak akan melihat sektor pertanian, perkebunan,

kehutanan, perburuan, dan perikanan sebagai sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan rasio penciptaan kerja pada 3 tahun awal pemerintahan Jokowi-JK. Selama periode 3 tahun awal Jokowi-JK, pekerja di sektor pertambangan dan penggalian, rata-rata mengalami penurunan sebesar 49 ribu penduduk per tahun dengan rata-rata RPK 1% pertumbuhan sektor tersebut mampu mengurangi 13.561 penduduk bekerja. Pada pemerintahan SBY-Boediono, rasio penciptaan kerja 43.435. Pada awal pemerintahan SBY-Boediono terjadi *boom* komoditas tambang terutama batubara sedangkan pada 2015 hingga pertengahan 2016, harga batubara turun drastis. Hal ini yang menyebabkan penurunan rasio penciptaan kerja di 3 tahun awal pemerintahan Jokowi-JK.

Sektor industri meskipun sedikit lebih baik daripada sektor pertanian dan sektor pertambangan, namun nilai rata-rata rasio penciptaan kerja sektor industri pengolahan pada 3 tahun awal pemerintahan Jokowi-JK lebih rendah jika dibandingkan dengan 3 tahun awal pemerintahan SBY-Boediono. Bahkan rasio penciptaan kerja industri pengolahan pada tahun 2016 bernilai minus dimana artinya pertumbuhan sebesar satu persen sektor industri pengolahan ternyata tidak mampu meningkatkan penduduk bekerja di sektor industri pengolahan. Pada tahun 2017 rasio penciptaan kerja sektor industri pengolahan sebesar 241.711. Hal ini terbantu oleh peningkatan penduduk bekerja di sektor industri pengolahan sebesar 1,03 juta penduduk. Peningkatan ini banyak dibantu oleh peningkatan pertumbuhan di industri makanan minuman, dan industri tekstil dan pakaian jadi yang outputnya masing-masing tumbuh signifikan.

Sektor konstruksi di pemerintahan Jokowi-JK memberikan tambahan penduduk bekerja sebesar 134,592 penduduk/tahun dan RPK 20,472 penduduk per 1% pertumbuhan. Jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan pada era SBY-Boediono yang mencapai rata-rata 483.633 penduduk/tahun dan RPK 63,072 penduduk per 1% pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur fisik sebagai program unggulan pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan tiga tahun belum mampu menghasilkan tambahan penduduk bekerja lebih banyak dari periode sebelumnya. Faktor terbesar yang menyebabkan hal ini terjadi adalah sektor konstruksi yang saat ini telah menjadi sektor padat modal.

Sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi memberikan rata-rata tambahan penduduk bekerja terbesar pada era Jokowi-JK, sebesar 1,106,590. Hal ini didukung oleh *boome-commerce* yang saat ini masih berlangsung dan dukungan sektor pariwisata yang meningkat. *E-commerce* Indonesia saat ini merupakan salah satu yang berkembang di Asia jika dibandingkan negara-negara tetangga seiring dengan pola konsumsi masyarakat yang perlahan berpindah ke online. Nilai investasi di sektor ini bahkan mencapai USD 5 Milliar dengan total nilai transaksi sebesar Rp 75 Triliun per tahun (Bank Indonesia, 2016).

Menarik melihat sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang sempat mencatatkan pertumbuhan minus (penduduk bekerja berkurang) di era SBY-Boediono, membalikan keadaan di era Jokowi-JK yang rata-rata memberikan tambahan 169,137 penduduk per tahun. Salah satu yang memberikan sumbangsih terhadap capaian ini adalah transportasi online, bisnis yang saat ini selalu dipersulit oleh pemerintah. Meskipun demikian, tambahan yang tinggi tersebut belum mampu mendongkrak RPK sektor tersebut yang hanya menghasilkan 18,160 penduduk bekerja per 1% pertumbuhan sektor tersebut.

Rasio Penciptaan Lapangan Kerja dalam 3 Tahun Pertama Jokowi-JK sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan menunjukkan angka yang anjlok nyaris 50 persen dibandingkan 3 Tahun Pertama SBY-Boediono. Salah satu penyebab terjadinya anjlok tersebut, patut diduga kuat, adalah karena lesunya bisnis properti sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2017. Menurut Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (BI) pada kuartal tiga (Q3) 2017, faktor-faktor yang membuat lesu bisnis properti adalah bunga KPR (20,36%), persyaratan uang muka (16,57%), pajak (16,13%), perizinan (14,45%), dan kenaikan harga bahan bangunan (11,68%).

Sedangkan dalam sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, Rasio Penciptaan Lapangan Kerja dalam 3 Tahun Pertama Jokowi-JK setali tiga uang, yakni terjadi penurunan. Penurunan berkisar pada angka 35 ribu bila dibandingkan dengan 3 tahun pertama SBY-Boediono. Namun, ada keanehan dalam sektor yang sebagian besar diisi sektor informal ini karena bila dibandingkan dengan capaian 3 tahun pertama SBY-Boediono yang mampu mengurangi hingga 7 juta tenaga kerja informal, Jokowi-JK hanya mampu mengurangi sekitar 1 juta tenaga kerja informal. Ada indikasi bahwa adanya kucuran dana desa sejak tahun 2015. mempengaruhi tenaga kerja pada sektor ini.

Tabel 4. Rasio Penciptaan Kerja (RPK) Berdasarkan Sektor Ekonomi Dalam 3 Tahun Pertama Pemerintahan *)

Sektor Ekonomi	Jokowi - JK (2015-2017)	SBY - Boediono (2010-2012)	SBY - JK (2005-2007)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	(195.860)	(145.504)	149.103
Pertambangan dan Penggalian	(13.453)	43.435	9.372
Industri	114.000	138.164	83.624
Listrik, Gas, dan Air Minum	10.042	2.857	(783)
Konstruksi	20.472	63.072	10.916
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	286.336	98.041	37,492
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	19.160	(28.282)	7.109
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	29.362	56.787	11.138
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	166.801	201.351	51.027

Sumber: Indef (2018), diolah dari data BPS

Keterangan: *)Tambahan penduduk bekerja per 1% pertumbuhan sektor ekonomi

Sektor pertanian perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan sangat tergantung dari harga komoditas. Namun dari internal sendiri peningkatan kesejahteraan dengan meningkatkan NTP (dengan meningkatkan harga jual di tingkat petani dan harga barang baku) menjadi salah satu solusi alternatif perbaikan kinerja sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Penciptaan produk tambang dan galian yang bernilai tambah tinggi harus semakin ditekankan dengan pengawasan pembangunan smelter untuk perusahaan tambang yang beroperasi di dalam negeri.

Sektor industri saat ini memang terhambat akibat adanya beberapa peraturan yang tidak menguntungkan pengusaha. Deregulasi dalam paket ekonomi dari mulai jilid 1 hingga 14 belum mempunyai dampak signifikan. Kemudahan berinvestasi harus terus ditingkatkan dengan memperbaiki regulasi baik di daerah ataupun pusat. Selain itu, program pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih difokuskan untuk pemenuhan sektor industri pengolahan.

Sektor konstruksi seharusnya mampu mengambil momentum kala pemerintah gencar dalam membangun infrastruktur. Kendalanya adalah ketersediaan bahan baku untuk membangun infrastruktur yang berasal dari impor sehingga kecil kemungkinan mampu menyerap tenaga kerja. Di saat yang bersamaan, sektor konstruksi sudah mengarah menjadi sektor padat modal. Solusi yang dapat ditawarkan adalah menjaga agar pemenuhan bahan baku infrastruktur saat ini agar memprioritaskan produk yang berasal dari dalam negeri.

Kinerja sektor perdagangan yang didorong oleh *e-commerce* saat ini baru berkontribusi terhadap PDB sebesar 0.75% atau 1,34% terhadap konsumsi rumah tangga. Namun demikian, angka ini akan terus meningkat dan berimplikasi terhadap kenaikan tambahan penduduk bekerja. Perlu diingat, penyerapan tenaga kerja di sektor *e-commerce* ke depan akan berada pada posisi jenuh yang mana penambahan penduduk bekerja tidak lagi terpenuhi. Salah satu solusi untuk menjaga kinerja sektor ini adalah memanfaatkan sektor pariwisata daerah dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus berbasis sektor pariwisata.

Serupa dengan *e-commerce*, sektor transportasi yang dipadati transportasi online juga akan merasakan hal yang serupa. Transportasi online saat ini berperan sebagai jaring pengaman dari jurang pengangguran. Fenomena ini baik sekaligus buruk. Baik karena berfungsi sebagai perubah nasib dari awal pengangguran atau hampir menganggur menjadi bekerja kembali.

Buruk karena ketika hal ini dibiarkan terus maka penduduk bekerja yang berada di dalam pasar tenaga kerja sektor ini akan semakin tinggi sehingga harga yang diminta akan murah. Implikasinya penurunan kesejahteraan pelaku transportasi online tersebut karena semakin murah harga yang diminta konsumen. Pemerintah perlu memberi keleluasaan penuh bagi sektor ini tanpa perlu direcoki dengan segudang peraturan yang berbelit.

Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan saat ini berkembang dalam hal Lembaga Keuangan, khususnya Perbankan dan di sisi lain menunjukkan kelesuan dalam hal Real Estate atau properti. Bisnis properti harus terus didorong dengan pembangunan hunian untuk masyarakat kelas menengah-bawah disertai dengan Bunga KPR dan DP yang rendah. Alasannya adalah karena lebih dari 76 persen konsumen masih mengandalkan kredit bank untuk membeli rumah. Potensi penyerapan tenaga kerja Real Estate masih besar karena saat ini masih ada backlog rumah yang mencapai 11,4 juta.

Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan memberi tambahan tenaga kerja sangat besar pada tahun 2017, yakni 1,09 juta penduduk dari tambahan tenaga kerja seluruh sektor adalah 3,25 juta jiwa. Banyak tenaga kerja pada sektor ini bersifat informal dan pada kalangan menengah-bawah. Dalam hal ini, perlu didorong adanya perlindungan sosial kepada masyarakat yang berada pada sektor ini karena sewaktu-waktu dapat masuk ke dalam golongan masyarakat miskin. Di sisi lain, pemerintah tetap harus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan sektor formal, khususnya melalui industri manufaktur yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

"Mampukah Pemerintahan Jokowi-JK Ciptakan Lapangan Kerja?"

Jakarta, 20 Februari 2018

- **Menurut Dradjad H. Wibowo, Ekonom Senior INDEF dan Dewan Kehormatan PAN**, penciptaan kerja adalah peubah ekonomi-politik yang sangat krusial karena menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
 - Melihat dua indikator penciptaan kerja, kinerja pemerintahan Jokowi-JK lebih rendah dari SBY-Boediono, tapi lebih baik dari SBY-JK. Jika tahun 2005 dikeluarkan, era Jokowi-JK lebih lemah dibanding SBY-JK.
 - Rata-rata penambahan penduduk bekerja di era Jokowi-JK sebesar 2.127.211 penduduk per tahun, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 2.868.457. Rasio penciptaan kerja (RPK) era Jokowi-JK sebesar 426,297 penduduk per 1% pertumbuhan ekonomi, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk.
- **Menurut Nailul Huda, Peneliti INDEF**, pada era Jokowi-JK, dua sektor ekonomi justru minus penciptaan kerjanya. Di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan, jumlah penduduk bekerja berkurang 700.624 penduduk. Ini melanjutkan tren minus pada era SBY-Boediono. Sektor pertambangan dan penggalian juga kehilangan hampir 50 ribu penduduk bekerja.
 - RPK di pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian mengalami kondisi minus di 3 tahun awal pemerintahan Jokowi-JK. Artinya, pertumbuhan output sektor ini justru diikuti pengurangan jumlah penduduk bekerja.
 - Sedangkan di sektor industri pengolahan, meskipun RPKnya positif, namun lebih rendah dari 3 tahun awal SBY-Boediono.
- **Menurut Andry Satrio Nugroho, Peneliti INDEF**, rata-rata penambahan penduduk bekerja pada era pemerintahan Jokowi-JK ditopang oleh sektor jasa perdagangan dan transportasi.
 - Sektor perdagangan, restoran, jasa akomodasi merupakan sektor yang paling tinggi kinerja penciptaan kerja, baik dilihat dari sisi tambahan penduduk bekerja maupun dari RPK. Sektor ini mampu menghasilkan rata-rata penambahan penduduk bekerja sebesar 1.106.590 penduduk per tahun. Hal ini disebabkan oleh masifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia.
 - Transportasi online terbukti mampu menyelamatkan penciptaan kerja era Jokowi-JK. Hal ini terlihat dari sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang berhasil memberikan tambahan 169,137 penduduk bekerja per tahun, setelah sebelumnya minus hampir 300 ribu orang pada era SBY-Boediono.
 - Sayangnya, pemerintah justru mempersulit pelaku usaha transportasi online dengan berbagai regulasi. Hal ini perlu dikoreksi

oleh pemerintahan Jokowi-JK jika ingin menciptakan lebih banyak pekerjaan.

- **Menurut Izzudin Al Farras Adha, Peneliti INDEF**, tahun 2017, ada keanehan dengan angka rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja naik tajam ke 3,25 juta.
 - Dilihat secara sektoral, tambahan terbesar diperoleh dari Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan yang jumlahnya adalah 1,09 juta pekerja baru. Faktor penyebabnya, diindikasikan, adalah karena adanya kucuran dana desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017. Dana desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dengan partisipasi masyarakat desa, tanpa menggunakan pihak ketiga. Seharusnya, sektor ini bukan menjadi penopang penciptaan lapangan kerja.
 - Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan menunjukkan kelesuan dalam hal Real Estate atau properti. Sektor ini menunjukkan angka yang anjlok nyaris 50 persen dibandingkan 3 Tahun Pertama SBY-Boediono. Salah satu penyebab terjadinya anjlok tersebut, patut diduga kuat, adalah karena lesunya bisnis properti sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2017.